

IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI KELEMBAGAAN PERBENIHAN PADI DI PROVINSI PAPUA BARAT

Entis Sutisna dan Fransiska Renita Anon Basundari

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
Entis 007@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni pada bulan April sampai Juni 2014. Menggunakan metode survei dengan tujuan mengidentifikasi dan mengkarakterisasi kelembagaan produksi perbenihan padi yang ada di Papua Barat. Hasil Pengkajian menunjukkan bahwa belum semua wilayah Papua Barat memiliki kelembagaan perbenihan, dari 10 kabupaten dan satu kota, baru ada tiga kabupaten yang sudah mulai menangani perbenihan padi. Di Kabupaten Manokwari terdapat BBI (Balai Benih Induk), BBU (Balai Benih Utama), dan penangkar benih. Sedangkan di kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni baru ada BBU dan Penangkar benih. Lembaga perbenihan padi yang sudah memproduksi benih setiap tahun dengan kapasitas terbesar baru BBI, yang lainnya belum memproduksi secara berkesinambungan. Distribusi benih terbesar adalah dijual ke pemerintah melalui BLBU. Selain itu ada juga yang digiling menjadi beras. Keberadaan Lembaga Perbenihan di Papua Barat masih lemah. Diperlukan dorongan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan perbenihan yang ada.

Kata Kunci: Kelembagaan produksi perbenihan padi, benih padi bermutu.

PENDAHULUAN

Benih memiliki peran strategis sebagai sarana pembawa teknologi baru, berupa keunggulan yang dimiliki varietas dengan berbagai spesifikasi keunggulan misalnya 1) daya hasil tinggi, 2) tahan terhadap hama dan penyakit yang mendukung sistem pola tanam dan pengendalian hama terpadu 3) umur genjah untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan 4) keunggulan mutu hasil panen sehingga sesuai dengan selera konsumen (Nugraha dan Hidayat, 2000) Keunggulan tersebut pertama kali ditemui pada benih sumbernya yakni benih penjenis (BS) sebagai kelas benih tertinggi.

Lembaga yang mengatur masalah perbenihan di Indonesia adalah Badan Benih Nasional (BBN). Badan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971 tanggal 5 Mei 1971. Pertimbangan didirikan BBN adalah upaya peningkatan produksi pertanian memerlukan kebijakan yang terkoordinasi dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan perbenihan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian

Benih bermutu dari varietas unggul spesifik lokasi merupakan komponen teknologi yang paling cepat diadopsi oleh petani (Anonim, 2007; Subandi, 2008). permasalahan muncul terkait dengan penyediaan benih bermutu yang memenuhi 'enam syarat tepat' (tepat varietas, jumlah, lokasi, mutu, waktu dan harga) yang belum dapat diakses oleh petani secara mudah dan murah.

Di Papua Barat, padi sudah menjadi komoditas strategis. Saat ini konsumen beras bukan hanya masyarakat pendatang, tetapi masyarakat lokal pun sudah mulai mengkonsumsi nasi. Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Papua Barat sudah memprogramkan komoditas padi sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2013 luas sawah di Papua Barat tercatat 6.794 ha, dengan tingkat produktivitas 4,12 ton/ha (Papua Barat Dalam Angka, 2014). Dari 11 Kabupaten Kota yang ada di wilayah Papua Barat sudah enam kabupaten yang mengembangkan padi sawah, dengan pusat pengembangan di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni, namun produktivitasnya masih relatif rendah. .

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas padi adalah masih rendahnya penerapan teknologi, termasuk penggunaan benih unggul bermutu. Kebutuhan benih bermutu di Papua Barat ditaksir paling sedikit 625 ton, sedangkan yang tercukupi baru sekitar 10 ton.

Rendahnya akses petani terhadap benih unggul bermutu tersebut kemungkinan terjadi karena kelembagaan perbenihan padi yang ada di Papua Barat belum berfungsi secara optimal sehingga system penyediaan benih bermutu belum dapat ditangani sesuai harapan. Akibatnya ketersediaan benih bermutu masih sangat kurang. Dengan demikian, upaya membangun dan mengembangkan sistem penyediaan benih bermutu bagi petani merupakan hal yang harus segera dilaksanakan.

Kelembagaan perbenihan yang dimaksud adalah sebagai institusi-institusi yang menangani perbenihan, serta hubungan-hubungan yang terjadi antara institusi tersebut berkaitan dengan upaya pengembangan lembaga perbenihan. Institusi atau lembaga yang menangani perbenihan tersebut diantaranya BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, BBI (Balai Benih Induk), BBU (Balai Benih Utama), dan pengkar benih, serta institusi lainnya baik formal maupun non formal. Kelembagaan tersebut sangat diperlukan keberadaannya dalam upaya memperlancar system penyediaan benih bermutu (Israel, 1990). Makalah ini bertujuan: 1) Mengidentifikasi kelembagaan perbenihan yang ada di Papua Barat; 2) Mengkarakterisasi kelembagaan perbenihan yang ada

METODOLOGI PENGKAJIAN

Kajian ini dilaksanakan bulan Juni- Agustus, 2014 di Kabupaten Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni. Penetapan lokasi pengkajian ditentukan secara sengaja yaitu daerah sentra pengembangan padi di Provinsi Papua Barat. Kelembagaan perbenihan yang diidentifikasi meliputi Balai benih Induk (BBI); Balai benih Utama (BBU), dan Penangkar Benih. Dalam proses sampling, jika banyaknya unit kelembagaan terdapat lebih dari 5 unit, diambil 30 – 40 %. jika sampelnya relatif kecil (2 – 3 unit), diambil seluruhnya sebagai responden (Tabel 1)

Hanya ada 3 jenis kelembagaan perbenihan padi yang akan di analisis, yakni BBI, BBU, dan penangkar benih padi. Hampir semua lembaga yang menangani benih padi dijadikan sampel dalam pengkajian ini

Tabel 1. Sampel Lembaga Perbenihan Padi di Papua Barat tahun 2013.

No	Jenis Kelembagaan Perbenihan Padi	Jumlah (unit)	Jumlah sampel (Unit)
1	Balai benih Induk (BBI)*)	1	1
2	BBU **)	3	3
3	Penangkar Benih:		
	Manokwari	7	3
	Sorong	2	2
	Teluk Bintuni	2	2
	Jumlah	15	11

Keterangan :*) BBI (Balai benih Induk) ada satu unit di provinsi

**) BBU (Balai Benih Utama) hanya ada satu setiap kabupaten.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber, baik melalui wawancara, maupun melalui observasi langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan substansi yang dikaji. Variabel-variabel data meliputi : Prasarana Lahan Untuk Produksi Benih; Prasarana Non Lahan; Produksi Dan Distribusi Benih; Kapasitas Produksi Benih; kualitas benih, dan lain-lain.

Analisis Data

Untuk menjawab tujuan dilakukan analisis deskriptif. Lembaga perbenihan padi yang diidentifikasi adalah lembaga produsen benih padi yang terdiri dari BBI (Balai Benih Induk), BBU (Balai Benih Utama), dan Penangkar Benih Padi. Sedangkan karakter kelembagaan perbenihan yang disoroti meliputi: Kondisi prasaran produksi (Lahan, dan non Lahan), Jenis dan kapasitas produksi, serta distribusi benih padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Kegiatan

Provinsi Papua Barat berada pada posisi 0°0′ - 4° 0′LS, dan 24° 00′ - 132°00′ BT. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah Selatan dengan Laut Bandan dan Provinsi Maluku, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram dan provinsi Maluku, dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua (Papua Barat dalam Angka 2011a).

Luas wilayah provinsi Papua Barat sekitar 97.024,27 km² dihuni oleh sekitar 760.422 jiwa, kepadatan penduduk 7,84 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan 3,71% (Papua Barat Dalam Angka, 2011b). Wilayah tersebut meliputi 10 kabupaten dan 1 kota. 54% masyarakat bekerja di bidang pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan, berburu, dll) (Papua Barat Dalam Angka 2011c).

Pada umumnya kegiatan pertanian masih dilaksanakan secara subsisten dengan orientasi produksi untuk dikonsumsi. Namun kegiatan usahatani lahan sawah sudah lebih maju dibanding lahan kering. Umumnya lahan sawah banyak dikerjakan oleh penduduk ex-

transmigrasi dari Jawa dan Bali. Tingkat produktivitas padi masih relatif rendah. Pada tahun 2007 tercatat luas panen padi sawah sekitar 22.957 ha dengan tingkat produktivitas sekitar 3,5 ton/Ha GKG. (Papua Barat Dalam Angka, 2008). Pada tahun 2008 luas panen meningkat menjadi 24.461 ha, produksi juga meningkat 4 %, namun produktivitas masih tetap rendah (Papua Barat dalam Angka 2009)

Kegiatan usahatani padi sawah baru dikembangkan di 6 kabupaten dari 11 kabupaten-kota yang ada saat ini. Pusat pengembangan komoditas ini berada di kabupaten Manokwari, kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan kabupaten Teluk Bintuni. Di kabupaten ini sudah mulai menggunakan benih-benih unggul, baik bersumber dari BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul), ataupun berasal dari petani penangkar.

Kelembagaan perbenihan seperti BBI (Balai Benih Induk) dan BPSB (Balai Pengawasan dan Serifikasi Benih) terdapat di provinsi, sedangkan BBU (Balai benih Utama) dan penangkar benih, baru ada di 3 kabupaten yaitu kabupaten Manokwari, kabupaten Sorong, dan kabupaten Teluk Bintuni.

Identifikasi Kelembagaan Perbenihan

Balai Benih Induk (BBI)

Lembaga perbenihan ini berkedudukan di Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manowari- Provinsi Papua Barat. Secara Struktural merupakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat. Lembaga ini didirikan melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2008 , tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Induk (BBI) padi, palawija dan hortikultura Provinsi Papua Barat, Ditetapkan di Manokwari pada Tanggal 4 Juli 2008. Dalam pelaksanaannya Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura Papua Barat mulai beroperasi tahun 2010 Berdasarkan Peresmian Oleh Gubernur Papua Barat yakni tanggal 02 Agustus 2010.

Susunan Organisasi Balai Benih Induk padi, palawija dan hortikultura Papua Barat sesuai Pergub. Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut : Kepala Balai; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Produksi Benih, dan Seksi Prasaranan dan Sarana. Kepala balai merupakan pipinan BBI menyandang jabatan Eselon III, struktur di bawahnya menyandang Jabatan Eselon IV.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BBI (dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2014) , meliputi: (1) Menyusun rencana dan program kerja; (2) Memproduksi Benih sumber tanaman padi, palawija dan hortikultura; (3) Melakukan pembinaan teknis Balai Benih Utama dan Benih pembantu; (4) Melakukan penerapan teknologi di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura; (5) Pelayanan informasi perbenihan padi, palawija dan hortikultura; (6) Pelayanan pemurnian kembali varitas unggulan yang sudah lama beredar; (7) Pelayanan pengujian varitas dan galur harapan yang berasal dari pemulia tanaman; (8) Pelayanan studi, latihan dan arena pertemuan, penyuluhan petani, kontak tani, penangkar benih, para petugas dan ahli dalam kalangan perbenihan padi, palawija dan hortikultura; dan (9) Pengelolaan urusan ketausahaan, pembiayaan dan perlengkapan.

Balai Benih Utama

Terdapat tiga BBU yang diidentifikasi, yaitu Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni. Manokwari berkedudukan di kampung Wariori (Sp-8) distrik Masni Kabupaten Manokwari. Institusi ini dikepalai oleh seorang kepala Balai dengan jabatan struktural tingkat Eselon IV dan dibawah langsung oleh Bidang Produksi Pertanian yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari. Untuk mendukung kinerja BBU, Kepala BBU dibantu tiga orang pegawai, dua diantaranya sudah pegawai negeri dan satunya masih magang.

Secara normatif tupoksi BBU adalah menghasilkan/melakukan perbanyakan benih bermutu kelas SS dan ES, termasuk melakukan pembinaan terhadap penangkar yang ada di wilayah kerja kabupaten (Dinas Pertanian dan Peternakan kab. Manokwari 2014). Namun demikian sampai saat ini tupoksi seperti di atas belum dapat dilaksanakan. Kegiatan BBU masih berorientasi pada produksi gabah dan tanaman lainnya untuk tujuan konsumsi.

BBU kabupaten Sorong terletak di Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk. Secara struktural kelembagaan ini merupakan UPTD Dinas Pertanian kabupaten Sorong yang berada langsung di bawah Bidang Produksi Tanaman Pangan (Dinas pertanian dan Perkebunan kab. Sorong, 2014). BBU didirikan pada tahun 2006, namun pembangunan sarananya dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2010. Sebenarnya BBU ini dipersiapkan untuk menangani pembibitan hortikultura. Sampai ini sudah memiliki koleksi kebun induk hortikultura seperti mangga, jeruk, dan rambutan, namun sampai saat ini belum menghasilkan benih bermutu secara keberlanjutan

Untuk mendukung kinerja lembaga ini, telah tersedia pegawai sebanyak 13 orang, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), kecuali satu orang tenaga kebun yang masih honorer. Pada saat observasi lapang, pada lahan BBU ditanami sayuran dan palawija untuk tujuan konsumsi.

BBU Kabupaten Bintuni terletak di kampung Tisac, distrik Bintuni, tidak jauh dari Kota. Secara struktural kelembagaan ini merupakan salah satu UPTD Dinas pertanian kabupaten teluk Bintuni, berada langsung di bawah Bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan kinerjanya lembaga ini memiliki enam pegawai, namun semuanya masih tenaga honor, kecuali kepala BBU yang sudah menjadi Pegawai Negeri (Dinas Pertanian kab. Teluk Bintuni, 2014).

BBU ini didirikan pada tahun 2010, dipersiapkan untuk menangani perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Namun sampai saat ini belum menghasilkan benih bermutu, baru pada taraf pemanfaatan lahan dengan komoditas jagung dan palawija lainnya. Dalam operasional kerjanya sampai saat ini belum ada alokasi anggaran yang tegas untuk produksi benih.

Kelompok Penangkar

Sebenarnya penangkar benih yang definitif di Papua Barat sampai saat ini belum ada, namun sudah ada calon penangkar yang sudah menghasilkan benih hasil bimbingan dari BPTP dan BBI Papua Barat. Kelompok penangkar ini sudah mulai produksi sejak tahun 2010,

namun pembinaannya hanya melalui pendampingan SL-PTT (petani demplot SLPTT) yang mendapat benih sumber dari BPTP yaitu varietas Ciharang, Cigeulis, Impari 8 dan Impari 9. Sedangkan sumber benih dari BBI adalah varietas Inpari 6 dan varietas Mekongga. Selanjutnya beberapa penangkar yang ada, dijadikan sebagai mitra kerja-sama UPBS BPTP Papua Barat dan kerjasama dengan BBI dalam produksi benih bermutu. Penangkar benih di kabupaten Manokwari terdapat di Distrik Masini 3 kelompok, distrik Prafi 2 kelompok, dan distrik oransbari 2 kelompok. Sementara itu penangkar di kabupaten Sorong terdapat di Kampung Walal, distrik Salawati Selatan, distrik Aimas, yaitu di kampung Malaweale, dan Malawili. Di Kabupaten teluk Bintuni kelompok penangkar berada di SP1 dan SP 4 Distrik Manimeri.

Karakterisasi Kelembagaan Perbenihan

Penguasaan lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi benih oleh BBI, BBU, dan para penangkar di provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa BBI memiliki lahan 11 ha, terdiri dari lahan sawah 7 ha, dan lahan kering 4 ha. Namun lahan tersebut (lahan sawah) belum bisa dipergunakan semuanya karena lahan masih banyak bermasalah sehingga kalau ditanami sering gagal panen. Dengan demikian dalam memproduksi benih BBI melakukan kemitraan/kerjasama dengan penangkar (menggunakan lahan penangkar).

Tabel 2. Prasarana Lahan Untuk Produksi Benih oleh BBI, BBU, Dan Penangkar di Provinsi Papua Barat 2013

No	Kelembagaan Perbenihan	Luas Penguasaan Lahan (ha)			
		Milik(Potensi)	Milik (digunakan)	Sewa *)	luas lahan untuk produksi benih
1	BBI	11	5	25	30
2	BBU MKW	10	0	0	0
3	BBU Sorong	5	2	0	0
4	BBU T.Bintuni	2	0	0	0
	P.Benih MKW				
	a. Masni	30	0	0	0
	b. Prafi	50	20*) 50**	0	20
	c. Oransbari	50	5 *)	0	5
5	P.Benih Sorong				
	a. Walal	50	50**	0	50
	B. Aimas	20	20	0	20
6	P.Beih T. Bintuni				
	SP.4	10	2*	0	2
	SP.1	10	2*	0	2

Keterangan *) Bagi Hasil /Kemitraan; ** program Pemberdayaan Penangkar padi

BBU kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan Sorong rata-rata memiliki lahan namun lahan tersebut belum dipergunakan untuk produksi benih bermutu, penggunaannya hanya sekedar pemamfaatan lahan untuk produksi gabah dab bahan pangan lainnya. Hal ini

terjadi karena pada umumnya BBU belum mendapat alokasi dana secara kontinyu dari Pemerintah daerah (Pemda).

Sementara itu lahan milik penangkar belum selamanya dipergunakan untuk produksi benih, itu tergantung pihak yang mau bekerjasama, baik BBI maupun UPBS BPTP. Jika tidak ada kerjasama, maka lahan petani penangkar sepenuhnya digunakan untuk produksi gabah, jadi tidak menghasilkan benih padi.

Kesepakatan yang diterapkan dalam proses kerjasama produksi benih antar BBI dengan penangkar yakni: BBI (pihak pertama) berkewajiban membiayai produksi benih, nanti setelah panen biaya produksi dikembalikan dalam bentuk “natura” sesuai harga benih yang berlaku (biasanya mengikuti harga BLBU), yaitu sebesar Rp 6000/kg benih. Jadi apabila biaya produksi per ha Rp 6.000.000, maka setelah panen BBI mendapat satu ton benih dari mitra/penangkar. Selain itu BBI juga diwajibkan memberi bimbingan teknis dalam produksi benih padi.

Dengan demikian dari aspek dukungan prasarana produksi benih padi (lahan), dapat dikatakan mencukupi, namun dari segi kualitas belum memadai, baik di BBI maupun BBU kabupaten Manokwari. Lain lagi di BBU kabupaten Sorong dan BBU kabupaten Teluk Bintuni, di sini kualitas lahan cukup baik, hanya belum digunakan untuk produksi benih, baru memproduksi gabah dan bahan pangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok BBU untuk menghasilkan benih bermutu, belum dapat dilaksanakan.

Prasarana pendukung produksi benih non lahan Di Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sarana Pendukung Produksi Benih Non Lahan Di Kabupaten Manokwari Tahun 2013

No	Nama BBI/BBU	Prasana Pendukung Produksi Benih Padi					
		Traktor	Trasher	Lantai jemur	Alat pengering	Seed Cleaner	Green House
1	BBI	8	4	1	1	1	1
2	BBU MKW	2	2	1	1	2	-
3	BBU Sorong	1	-	-	-	-	2
4	BBU T.Bintuni	1	-	1	1	1	-
5	P.Benih MKW						
	a. Masni	2	4	-	-	-	-
	b. Prafi	2	4	1	-	-	-
	c. Oransbari	2	4				
6	P.Benih Sorong						
	a. Walal	2	3	-	-	-	-
	B. Aimas	2	3	1	-	-	-
7	P.Benih T. Bintuni						
	SP.4	2	4	-	-	-	-
	SP.1	2	4	-	-	-	-
	Jumlah	16	14	2	22	3	1

Dari aspek sarana pendukung non lahan cukup tersedia, kecuali BBU Sorong masih minim. Dalam kaitannya dengan penguasaan/pemilikan peralatan pendukung, kelihatannya semakin tinggi hirarki kelembagaan semakin tinggi pula sarana pendukung yang dimiliki. Berdasarkan banyaknya sarana pendukung produksi maka BBI terlihat paling banyak, kemudian BBU Manokwari, BBU Bintuni, dan BBU Sorong. Sedangkan penangkar masih banyak menggunakan peralatan milik masyarakat yang dikelola oleh UPJA (unit Pengelolaan Jasa Alsintan).

Jenis Benih yang Diproduksi

Jenis benih yang diproduksi oleh setiap lembaga perbenihan, pada umumnya adalah produksi benih padi, namun demikian ada juga benih lainnya seperti hortikultura dan palawija, seperti terlihat pada Tabel 4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis produksi benih yang diproduksi pada umumnya adalah Benih Padi Sawah. Sedangkan bibit Palawija dan hortikultura masih jarang diproduksi. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan usahatani padi lebih menonjol dibanding usaha tanaman pangan lainnya. Dari aspek status, BBI dan BBU merupakan lembaga pemerintah, sedangkan penangkar merupakan kegiatan usaha perorangan.

Tabel 4. Jenis Produksi Benih yang di Hasilkan Oleh Lembaga Perbenihan di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

No	Nama BBI-BBU	Jenis Benih yang dihasilkan	Status		
			Lembaga Pemerintah	Swasta	Perorangan
1	BBI	Padi, kedelai,	Ya	-	-
2	BBU. Manokwari	Padi	Ya	-	-
3	BBU Sorong	Hortikultura	Ya	-	-
4	BBU T. Bintuni	Palawija	Ya	-	-
5	P.Benih Manokwari				
	a. Masni	Padi	-	-	Ya
	b. Prafi	Padi	-	-	Ya
6	P.Benih Sorong				
	a. Walal	Padi	-	-	Ya
	B. Aimas	Padi	-	-	Ya
7	P.Benih T. Bintuni				
	SP4	Padi	-	-	Ya
	SP1	padi	-	-	Ya

Kapasitas produksi benih terbanyak dihasilkan oleh BBI, namun hampir semuanya (sekitar 98%) dihasilkan melalui kerjasama dengan penangkar benih padi, yang dihasilkan di lahan sendiri hanya sekitar 2%. (Tabel 5).

Tabel 5. Banyaknya Produsen dan Jumlah Benih yang Dihasilkan Berdasarkan Kelas Benih di Papua Barat Tahun 2012

No	Nama Lembaga	Jumlah Produksi Benih Yang dihasilkan Tahun 2012 (ton)			Keterangan
		Ss	Fs	ES	
1	BBI	0	2	0	Dari lahan sendiri
2	BBU Manokwari	20	0	0	Kerjasama dgn UPBS
3	BBU Sorong	0	0	0	Tdk produksi benih
4	BBU T. Bintuni	0	0	0	Tdk produksi benih
5	P.Benih Manokwari				
	a. Masni	15	0	0	Kerjasama dgn BBI
	b. Prafi	60	0		Kerjasama dgn BBI
	c. Oransbari	36	0	0	Kerjasama dgn BBI
6	P.Benih Sorong				
	a. Walal	0	0	30	Kerjasama dgn BBI
	B. Aimas			150	Kerjasama dgn BBI
7	P.Benih T. Bintuni				
	Sp 4	0	0	2	Kerjasama dgn BBI
	SP1	0	0	2	Kerjasama dgn BBI
	Jumlah	131	2	184	

BBI Sebagai institusi/lembaga penghasil benih selayaknya dapat memproduksi benih dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri, termasuk pelibatan tenaga teknis dan ahli yang propesional dibidang perbenihan. Hal ini sangat berkaitan dengan harapan tercapainya output yang dihasilkan berupa benih bermutu, sekaligus meningkatkan keyakinan konsumen akan jaminan kualitas produksi.

Memang ada lembaga perbenihan yang bertugas mengawasi kualitas, yaitu BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih) namun Lembaga ini juga belum berfungsi secara baik mengingat ketersediaan tenaga lapangannya masih sangat kurang. Dengan demikian pengawasan kualitas calon benih di lapangan masih lemah dan dapat berakibat pada rendahnya kualitas benih yang dihasilkan.

Selanjunya dapat kita lihat juga (Tabel 4) bahwa hampir semua BBU tidak dapat memproduksi benih bermutu, kecuali BBU Manokwari dapat menghasilkan produksi benih hasil kerjasama dengan UPBS (Unit Pengembangan Benih Sumber) yang ada di BPTP Papua Barat.

Hadirnya UPBS BPTP Papua Barat sebagai institusi penghasil benih, sebenarnya bertujuan untuk membantu menangani masalah tidak tersedianya benih bermutu secara memadai. Namun dalam pelaksanaannya masih “ kurang harmonis” dengan BBI karena dianggap pesaing dalam pemasaran benih. Akhirnya UPBS yang ada di BPTP juga tidak bisa berkembang sebagai institusi yang melakukan bisnis di bidang perbenihan.

Distribusi Benih

Benih Padi pada umumnya dipergunakan oleh petani untuk menunjang kegiatan usahatannya. Beberapa tahun terakhir kebutuhan benih untuk petani dipenuhi melalui

program BLBU yang merupakan subsidi dari pemerintah. Implementasinya di Papua Barat Pengadaan benih di tangani oleh PT Sanghyang Seri (SHS) dan dikerjasamakan antara SHS, Komisi benih di Provinsi (BBI, BPSB, Dinas Pertanian Kabupaten) dan Penangkar binaan. Secara eskplisit distribusi benih padi dituangkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Benih Padi Berdasarkan Produsen Benih di Provinsi Papua Barat Tahun 2012

No	Nama BBI/BBU	Distribusi Benih Padi (Ton)			
		Digunakan sendiri	Dijual Ke Pemerintah (BLBU)	Ditukar sesama Petani	Di giling/dijadikan beras
1	BBI	2	0	0	1
2	BBU Manokwari	2	0	8	10
3	BBU Sorong	0	0	0	0
4	BBU T. Bintuni	0	0	0	0
5	P.Benih Manokwari				
	a. Masni	0,5	5	4	5
	b. Prafi	1	20	5	34
	c. Oransbari	1	15	5	15
6	P.Benih Sorong				
	a. Walal	1	20	4	5
	B. Aimas	1	50	9	90
7	P.Benih T. Bintuni				
	Sp1	0,5	0	1,5	0
	SP4	0,5	0	1,5	0
	Jumlah	9,5	110	39	160

Distribusi benih yang utama adalah dijual ke pemerintah melalui program BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul). Selan itu ada yang ditukar kepada sesama petani, dan digiling menjadi beras. Hal ini terjadi karena proses distribusi benih oleh BLBU terlambat sementara kebutuhan ekonomi keluarga sudah mendesak.

KESIMPULAN

Kelembagaan perbenihan yang sudah memproduksi benih setiap tahun secara kontinyu dengan kapasitas produksi yang cukup besar adalah BBI, walaupun masih menggunakan lahan milik penangkar. Kelembagaan lainnya masih” timbul tenggelam”. Distribusi benih mayoritas dijual ke pemerintah melalui BLBU. Selain itu ada juga yang di giling menjadi beras, karena tidak laku/lambat dibeli. Keberadaan Lembaga Perbenihan di Papua Barat masih sangat lemah. Diperlukan dorongan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan perbenihan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Papua Barat, 2014. Laporan Tahun 2014.
 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manopkwari, 2014. Laporan Tahun 2014.

- Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Teluk Bintuni, 2014. Laporan Tahun 2014.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sorong, 2014. Laporan Tahun 2014.
- Israel, Arturo. 1990. Pengembangan Kelembagaan; Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia. Jakarta. LP3ES.
- Nugraha, U.S., H. Smalders, and N. Saleh. 1995. Seed quality of secondary food crops in Indonesia. Paper presented at the Workshop on Integrated Seed Systems for Low-Input Agriculture, 24-27 October 1995. RILET Malang-Indonesia. 23p.
- Papua Barat Dalam Angka, 2009; Badan Pusat Statistik Papua Barat.
- Papua Barat Dalam Angka, 2011. Badan Pusat Statistik Papua Barat.
- Papua Barat Dalam Angka, 2013. Badan Pusat Statistik Papua Barat.
- Per. Gub. No.12 Tahun 2008. Sistem Organisasi Balai Benih Induk Padi, Palawija, dan Hortikultura Papua Barat
- Puslitbangtan. 2007. Teknologi Unggulan Tanaman Pangan. Badan Litbang Pertanian,